



PROGRAM KERJA 2021



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri, Kec. Teluk. Betung Utara,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35211

**PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDARLAMPUNG**



TAHUN 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA PTA

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Visi dan Misi
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Ruang Lingkup

**BAB II. PROGRAM KERJA PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

- A. Bidang Manajemen Peradilan
- B. Bidang Kepaniteraan
- C. Bidang Kesekretariatan
 - 1. Keuangan dan Pelaporan
 - 2. Kepegawaian
 - 3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - 4. Umum TURT
- D. Bidang Program Unggulan Badilag
- E. Bidang Organisasi Penunjang

**BAB III. SIMBOL-SIMBOL PENGUATAN
TUGAS PERADILAN AGAMA**

- A. 9 Program Reformasi Birokrasi
- B. 10 Budaya Malu
- C. Budaya Kerja PTA

BAB IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SAMBUTAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah.SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sejauh ini masih dapat menjalankan tugas kedinasan dengan baik.

Kemudian shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad, SAW, beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Saya menyambut baik hasil kerja Tim Perumus Rakornas Badilag Tahun 2021 yang telah menghimpun data dan bahan dari setiap bagian tugas Pengadilan untuk dijadikan buku berbentuk Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2021, insya Allah Program Kerja ini akan menjadi pedoman kerja kami di tahun 2021 ini.

Kedepan tugas dan tantangan semakin berat dan kompleks, karenanya setiap aparat Peradilan dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya dan segera menguasai teknologi informasi yang terkait dengan tugasnya masing-masing agar pemanfaatan teknologi tersebut dapat meringankan kinerja kita.

Akhirnya dengan niat yang baik dan integritas yang tinggi maka aparat peradilan akan dapat menghadirkan suatu kepuasan bagi masyarakat pengguna Pengadilan dan juga berbuah amal ibadah di sisi Allah, SWT. Aamiin.

Wassalam,

Ketua,



Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958)
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076)
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara R.I tahun 2009 Nomor 89 tambahan lembaran Negara Nomor 5078)
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor W8-A/585/OT.01.1/3/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Tim Penyusunan Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempunyai visi sebagai tujuan dari pengabdian yaitu :

“Terwujudnya Peradilan yang Agung dan modern di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung”

”

2. MISI

Untuk mewujudkan visi diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen Peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
- f. Mendorong terbentuknya Peradilan Agama di Kabupaten/Kota pemekaran di Provinsi Lampung.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Penyusunan Program Kerja bertujuan untuk menghimpun data dan bahan yang akan dikerjakan pada tahun 2021, sehingga ada kepastian program tersebut dalam satu unifikasi, yang nantinya menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas, kemudian setidak-tidaknya pada akhir tahun akan dievaluasi kembali seberapa jauh tingkat keberhasilannya. Dan tentunya program yang belum terlaksana atau belum berhasil dengan baik akan menjadi bahan pertimbangan untuk Pembuatan/Penyusunan Program Kerja Tahun berikutnya.

2. SASARAN

Bahwa apa yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 ini, baik yang bersifat teknis yustisial maupun non yustisial dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memenuhi sasaran yaitu terwujudnya apa yang menjadi Visi dan terlaksananya apa yang menjadi Misi.

D. RUANG LINGKUP

Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di tahun 2021 ini tidak terlepas dari apa yang telah menjadi visi dan misi baik yang bersifat teknis yustisial maupun non yustisial ditambah dengan

program-program baru dari Ditjen Badilag, bidang-bidang yang menjadi tugas Pengadilan itu adalah :

1. Manajemen Peradilan dan Kebijakan pimpinan
2. Bidang Kepaniteraan termasuk Administrasinya
3. Bidang Kesekretariatan termasuk Administrasinya
4. Bidang Pelayanan Publik
5. Program Unggulan Badilag
6. Bidang Organisasi Penunjang.

Dalam program kerja ini bidang-bidang tugas sebagaimana tersebut di atas akan diuraikan sedemikian rupa, sehingga dapat memberi gambaran yang jelas apa-apa yang akan dilaksanakan atau dibuat.

BAB II PROGRAM KERJA PTA BANDAR LAMPUNG

A. BIDANG TEKNIS

Manajemen Teknis adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Adapun rincian Program Kerja di Bidang Teknis adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal Perkara yang dimohonkan eksekusi, asli sertifikat dipegang oleh termohon eksekusi dan tidak mau menyerahkannya, sementara KPKNL memerlukannya untuk kelengkapan Jelang, maka **perlu dilakukan koordinasi dengan KPKNL :**
 - a. PA mengirimkan surat permohonan Blokir kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan melampirkan putusan PA agar BPN mengeluarkan surat keterangan bahwa sertifikat tersebut yang ada pada termohon telah diblokir dan selanjutnya surat pemblokiran dari BPN tersebut dikirim kepada KPKNL.
 - b. Untuk kelancaran penyelesaian permohonan eksekusi, perlu dilakukan koordinasi dan MoU dengan BPN/ATR dan KPKNL di masing-masing daerah dan untuk tingkat nasional dilakukan MoU antara MA dalam hal ini Ditjen Badilag MA-RI dengan Badan Pertanahan Nasional dan Dirjen Kekayaan Negara.
2. **Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kembali** jika suatu perkara harta bersama telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Pada saat aanmaning, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Penggugat. Namun dengan berjalannya waktu Tergugat tidak jadi menyerahkan obyek tersebut.

3. Jika dalam amar putusan eksekusi riil sebidang tanah bersertifikat tidak terdapat perintah untuk menyerahkan sertifikat, maka jurusita tidak boleh mengambil sertifikat yang dikuasai termohon eksekusi
4. Perihal KPKNL tidak mau melaksanakan lelang dengan alasan tanah tersebut tidak bersertifikat, maka Eksekusi dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil/ dengan jalan mediasi/ daading atau dengan melakukan pendekatan kepada KPKNL.
5. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai amar putusan. Jika tidak dapat dilaksanakan diterbitkan penetapan yang menyatakan eksekusi non exscutable. Pada prinsipnya yang dieksekusi adalah amar putusan. Oleh karena itu dalam merumuskan amar harus rigit, lengkap, jelas dan tidak multi tafsir.
6. Apabila Pemohon eksekusi setelah ditegur sebanyak tiga kali ternyata tetap tidak mau menambah panjar biaya eksekusi, padahal biaya itu diperlukan untuk kelancaran jalannya eksekusi, maka permohonan eksekusi dicoret dari daftar perkara permohonan eksekusi. Jika Pemohon eksekusi ingin melanjutkan lagi, maka Pemohon harus mendaftar ulang eksekusi baru mulai dari awal. Sebaiknya pendaftaran eksekusi biayanya dihitung sampai biaya pengosongan sekaligus.
7. Perlu ada aturan terkait hal batasan ganti rugi atas perbuatan Melawan Hukum (PMH)
8. Ganti rugi (ta'widh) dalam perkara ekonomi syariah, berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ganti rugi ekonomi syariah tidak boleh menerapkan bunga (interst), kemungkinan kerugian yang akan dialami (potencial loss) dan keuntungan yang diharapkan. Untuk itu, pelajari Fatwa DSN -MUI Tentang Wanprestasi Dan Ganti Rugi, Antara Lain:
 - a. Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi
 - b. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

- c. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
9. Jika ada perkara gadai (rahn) yang pihak-pihaknya beragama Islam dan akadnya dilakukan secara lisan, status akadnya (secara syariah atau tidak) tergantung pemeriksaan di persidangan. Jika terbukti akad tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, maka bukan menjadi kewenangan PA.
 10. "Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam, hanya dapat dilakukan sebelum obyek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/ nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan"
 11. Peningkatan penggunaan E-court dan E-Litigasi di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
 12. Mengimplementasikan 15 (Limabelas) Aplikasi Unggulan Badilag di Pengadilan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
 13. Peningkatan pelaksanaan Akredetasi Penjaminan Mutu (APM)
 14. Peningkatan pelaksanaan pembangunan zona integritas (ZI)
 15. Peningkatan pembinaan dan pengawasan
 16. Peningkatan kualitas Putusan
 17. Peningkatan penyelesaian perkara
 18. Peningkatan kualitas SDM tenaga teknis
 19. Peningkatan pelayanan meja informasi dan pengaduan (PTSP)
 20. Peningkatan efektifitas pengelolaan dan penataan dokumen, instrumen dan formulir administrasi kepaniteraan.
 21. Peningkatan kualitas pinatausahaan pengelolaan biaya proses perkara baik tingkat banding maupun tingkat pertama.
 22. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu laporan perkara tingkat banding dan laporan rekap perkara tingkat pertama
 23. Peningkatan tertib pengelolaan dan penatan arsip perkara, arsip surat masuk, surat keluar dan tata naskah dinas di bagian

kepaniteraan dan kesekretariatan baik di tingkat banding maupun tingkat pertama

24. Peningkatan peran Bagian Kesekretariatan dan kepaniteraan untuk mendukung dan mensukseskan terlaksananya Tupoksi lembaga peradilan
25. Peningkatan sarana dan pra sarana untuk mendukung kualitas pelayanan dan pelaksanaan tupoksi peradilan baik hakim, pejabat fungsional dan struktural di bagian kepaniteraan dan kesekretariatan.
26. Peningkatan transparansi pengguna dan pengelolaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04.
27. Mendorong Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk selalu berinovasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

B. BIDANG KEPANITERAAN

Program kerja di bidang kepaniteraan yaitu :

1. Pengisian data di Aplikasi Kinsater Badilag di website <http://kinsatker.badilag.net/> setiap awal bulan untuk penginputan
 - a. - LIPA 14 (Sidang Luar Gedung)
 - b. - LIPA 15 (Pembebasan Biaya Perkara)
 - c. - LIPA 16 (Bantuan Hukum)
 - d. - LIPA 23 (Sidang Terpadu)
2. Pengisian data di Aplikasi Kinsater Badilag di website <http://kinsatker.badilag.net/> setiap awal bulan untuk penginputan data dukung keuangan perkara seperti ;
 - Data dukung keuangan perkara
 - Data rekening koran

3. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melakukan inovasi di bagian kepaniteraan dalam arsip putusan banding dengan membuat barcode putusan yang berisi putusan perkara banding. Tujuan dari penggunaan barcode putusan adalah untuk memudahkan dalam pengarsipan softfile putusan banding, meminimalisir biaya dalam penggunaan CD putusan serta meminimalisir kesalahan dalam pengiriman softfile yang kosong dalam kesalahan burning sehingga tidak dilakukan kembali pengiriman *softfile* putusan
4. Memperhatikan kelengkapan pengiriman berkas perkara banding sebelum dilakukan pengiriman harus diceklist kelengkapan berkas dengan lengkap sehingga PTA Bandar Lampung tidak perlu lagi menunda dalam mendaftarkan perkara banding di SIPP karena kenyataan selama ini masih ada kekurang bukti setor PNBPN, bukti setor biaya perkara banding dll,.
5. Dalam rangka penerimaan perkara banding melalui E-Court banding, diharapkan untuk tetap mengirim berkas *Hardcopy* bundel a dan b untuk memudahkan dalam pengecekan kelengkapan berkas banding.
6. Pengisian data keuangan perkara di website <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/> dilakukan setiap awal bulan
7. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sudah beberapa bulan terakhir ini, selalu terlambat dalam pengiriman laporan bulanan perkara ke Badilag, namun hal tersebut disebabkan masih ada PA yang terlambat mengirimkan laporan perkara bulanan ke PTA Bandar Lampung.

8. Sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Badan Peradilan Agama No : 887/DjA.2/HM02.3/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 kepada untuk seluruh satker untuk menginput putusan ekonomi syariah pada aplikasi VISION di Link <https://ditbinganis.badilag.net/ekonimisyariah/>
9. Penanganan Penyelesaian Perkara Banding 100%
10. Pembaharuan SK Bagian Kepaniteraan
11. Pembuatan Papan Keadaan Perkara, Grafik Perkara Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung
12. Penyajian Informasi Perkara yang diajukan Kasasi dan PK
13. Penjilidan Salinan Putusan Banding per 6 (enam) Bulan
14. Melaksanakan Eksaminasi Putusan Hakim PA Sewilayah PTA Bandar Lampung
15. Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Kepaniteraan (PP)

C. BIDANG KESEKRETARIATAN

Program Kerja bidang kesekretariatan yaitu :

1. Dalam hal mengatasi permasalahan Anggaran program prioritas yaitu (sidang keliling , posbakum dan prodeo) untuk PA yang baru dibentuk juga perlu dianggarkan biaya Sidang Keliling dan Posbakum, mengingat lokasi tempat tinggal masyarakat ke kantor PA sangat jauh serta PTA diberi kewenangan menggeser anggaran pagu indikatif tersebut antar satker pada lingkungan masing-masing; dengan tetap seijin eselon 1 (Dirjen Badilag).
2. Untuk mengatasi permasalahan Penginputan data kepegawaian dilakukan secara berulang antara ABS dan SIKEP, Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tentang Penerapan Aplikasi SIKEP, sebaiknya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan hanya menggunakan SIKEP, untuk kebutuhan khusus Ditjen Badilag dapat membangun ABS dengan memanfaatkan API (Application Programming Interface) yang telah disediakan aplikasi SIKEP
3. Dalam mengatasi permasalahan masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan satuan kerja Penambahan tenaga dengan kualifikasi jabatan pelaksana dan peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas
4. Untuk mengatasi permasalahan Proses Pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum yang dilaksanakan selama ini berpedoman pada surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3/Bua.ULP/2/2018 tanggal 8 Februari 2018, Hal Langkah-Langkah

Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan dimana metode pemilihannya dilaksanakan melalui penyedia sesuai Perlemb LKPP Nomor 9 Tahun 2018 sehingga dalam RUP PPK menetapkan paket Pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum sebagai paket penyedia. Sedangkan petugas posbakum yang selama ini digunakan oleh satker adalah LBH Universitas (Contoh LBH IAIN, LBH. UNG, dll). Jika berpedoman pada Perlemb LKPP Nomor 9 Tahun 2018, penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi : Meminta kepada Ditjen Badilag untuk mengusulkan pengecualian pengadaan barang dan jasa Posbakum dengan metode swakelola ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

5. Indikator Kinerja Utama yang sudah tidak terdapat dalam Renstra Mahkamah Agung yaitu :
 - a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan,
 - b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat, tidak perlu dimasukkan lagi
6. Untuk mengatasi permasalahan khususnya bagian kesekretariatan dikarenakan banyaknya yang beralih ke Panitera Pengganti/Jurusita sehingga mengakibatkan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bagian Kesekretariatan agar dalam perekrutan tenaga teknis (panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti) peradilan agama yang berasal dari tenaga kesekretariatan mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/II/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya; Agar dalam perekrutan tenaga teknis (panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti) peradilan agama yang berasal dari tenaga kesekretariatan mengacu Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan Menjadi Tenaga Teknis (Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti)
7. Peningkatan kualitas Administrasi Keuangan.
8. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
9. Peningkatan Kinerja Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas Administrasi Tata Persuratan
11. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Layanan Perpustakaan
12. Peningkatan penyusunan perencanaan program
13. Mendukung pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan

D. BIDANG PROGRAM UNGGULAN BADILAG

Program unggulan Badilag telah disinggung secara singkat pada bidang manajemen Peradilan namun belum dapat disajikan secara rinci dan jelas karena belum menerima panduan atau petunjuk teknis dari Badilag terutama yang terkait dengan 15 aplikasi unggulan Badilag tersebut.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) secara rinci disajikan dalam lampiran.

E. BIDANG ORGANISASI PENUNJANG

Di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung disamping menjalankan roda organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi juga ada organisasi penunjang lainnya yang juga mempunyai program sebagai berikut :

1. IKAHI

PROGRAM KERJA IKAHI CABANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG PRIODE TAHUN 2020 - 2021

Menimbang : Bahwa untuk memelihara harkat dan martabat hakim serta mengembangkan profesionalisme dan kemandiriannya dalam menghadapi tantangan persoalan hukum yang semakin kompleks, maka untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu membuat program kerja, sebagai acuan kegiatan.

Mengingat : 1. Pasal 5, ayat 5 Anggaran Dasar IKAHI Pusat, Keputusan No. V/MUNAS/IKAHI XVI/X/2010, Tanggal 15 Oktober 2010, sebagaimana telah diperbaharui / disempurnakan dengan Keputusan No. VI/MUNAS/IKAHI XVII/2013, Tanggal 20 Oktober 2013. Tentang pembentukan IKAHI Cabang di Tingkat Banding.

2. Surat Keputusan KPTA Bandar Lampung, No. W8-A/1628/OT.00/11/2019, Tanggal 1 November 2019, Tentang "SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) CABANG PTA BANDAR LAMPUNG PRIODE 2019 – 2022"

Memperhatikan: Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 30 Desember 2019, dalam acara pengukuhan Pengurus IKAHI CABANG PTA Bandar Lampung, priode 2019 –2022.

PROGRAM KERJA IKAHI

Bahwa program kerja ini mengacu kepada Seksi – seksi yang tertuang dalam Surat Keputusan KPTA Bandar Lampung, Nomor W8-A/1628/OT.00/11/2019, tanggal 1 November 2019, sebagai berikut :

A. SEKSI KAJIAN HUKUM

Dalam Kajian Hukum, IKAHI CABANG PTA Bandar Lampung, memprogramkan kegiatan sebagai berikut :

1. DISKUSI HUKUM INTERN

- a. Melaksanakan diskusi hukum oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang pesertanya hanya terbatas kepada Hakim Tinggi PTA saja;
- b. Materi diskusi ditentukan oleh peserta dengan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kekinian dan perspektif hukum ke depan;
- c. Pelaksanaan diskusi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan, dengan ketentuan : bentuk, tempat dan waktu diskusi ditentukan oleh pengurus/ peserta diskusi;
- d. Biaya diskusi diambilkan dari urunan hakim untuk diskusi dan atau ada dana / donator lain yang sah dan tidak mengikat.

2. DISKUSI HUKUM GABUNGAN

- a. Mengadakan diskusi hukum gabungan antara hakim, panitera dan panitera muda serta panitera pengganti sewilayah PTA Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjend Badilag Nomor 1324/D.j.a/OT.01.1/IV/2019, tanggal 12 April 2019, Tentang Diskusi hukum dan Tehnis Yustisial;
- b. Materi diskusi ditentukan oleh panitia diskusi PTA dan panitia daerah;
- c. Pelaksanaan diskusi gabungan diadakan setiap 4 (empat) bulan sekali (pride April, Agustus dan Desember). Tempat, bentuk dan tehnis diskusi disepakati oleh panitia PTA dan panitia Daerah;
- d. Biaya diskusi diambilkan dari urunan hakim dan panitera khusus untuk diskusi, dan atau ada dana / donator lain yang sah dan tidak mengikat.

B. SEKSI KAJIAN KITAB KUNING

IKAHI Cabang PTA Bndarlampung memandang perlu untuk mengkaji kembali KITAB KUNING, sebagai salah satu refrensi dalam beristinbat dan menemukan hukum, terutama yang berkaitan dengan kewangan Absolut Peradilan Agama di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Hibah;
- d. Wasiat;
- e. Wakaf;
- f. Shodaqoh dan
- g. Ekonomi syari'ah.

Adapun KITAB KUNING yang menjadi Refrensi tersebut adalah ;

- a. Al – Baijuri;
- b. Fathu al – Mu'in;
- c. Asy – Syarkawi 'ala at – Tahrir;
- d. Al – Qalyubi / al – Mahalli;
- e. Fathu al – Wahhab wa syarhu;
- f. At – Tuhfah;
- g. Targhib al – Musytaq
- h. Al – Qawanin asy- Syar'iyah li Sayyid Shadaqah Dachlan;
- i. Asy – Syamsuri fi al – faraidl;
- j. Bughyah al – Mustarsyidin;

- k. Al – Fiqh ‘ala al- Madzhahib al- Arba’ah;
- l. Al- Mughni al- Muhtaj;
- m. Bidayatu al Mujtahid;
- n. Al – Fiqhu as- Sunnah.

Pelaksanaan pembahasan (kajian) KITAB KUNING ini disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan tempat, waktu dan tehnik pelaksanaan ditentukan kemudian oleh panitia dan peserta.

Biaya pelaksanaan diambilkan dari urunan hakim dan atau ada dana/ donator lain yang sah dan tidak mengikat.

C. SEKSI SOSIAL

Anggota IKAHI Cabang PTA Bandar Lampung sedapat mungkin ikut dalam kegiatan-kegiatan social yang terkait dengan kepentingan IKAHI dan atau kepentingan bersama sesama warga Peradilan , termasuk dengan Peradilan Lain.

1. INTERN IKAHI CABANG PTA BANDAR LAMPUNG

- a. Memberi bantuan dana sepentasnya kepada anggota IKAHI yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, pendidikan dan semacamnya;
- b. Membantu dalam bentuk sumbangan yang wajar kepada anggota yang mendapat musibah baik sakit maupun kematian;
- c. Besaran bantuan yang bersifat dana ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.

2. SESAMA WARGA PERADILAN AGAMA

Mengikuti kegiatan social sebagaimana lazimnya selama ini berlaku seperti :

- a. Kegiatan olah raga;
- b. Kegiatan sumbangan BDBS;
- c. Kegiatan rekreasi.
- d. Kegiatan lain yang terkait dan terkordinasi.

3. DENGAN PERADILAN LAIN

- a. Mengikuti acara Ulang Tahun Mahkamah Agung dan rangkayannya;
- b. Acara / Kegiatan lain yang ada koordinasinya.

2. PTWP

- Laporan keuangan supaya transparan setiap bulan.
- Perlu Pengadaan Kaos Olahraga untuk semua anggota PTWP
- Memperhatikan/Mengingatkan kantor memperbaiki lapangan indoor

3. DANA SOSIAL

- Laporan keuangan setiap bulan transparan.
- Distribusi dansos untuk :
 1. Anggota IKAHI dan Pegawai lainnya yang mutasi dan pension.
 2. Pengajuan baju dinas
 3. Acara makan bareng tapi semua anggota IKAHI sekeluarga/rekreasi
 4. Bantuan untuk Hakim dan Pegawai yang sakit

4. MUSHALLA

- Tausiah seminggu sekali ada absensi
- Peringatan Hari Baesar Islam (PHBI)
- Tabungan qurban dicicil setiap bulannya bulan sekali

5. DHARMAYUKTI KARINI

1. Pertemuan rutin 2 bulan sekali antar pengurus dan anggotanya (antar PT dan PTA)
2. Pertemuan daerah 3 bulan sekali antar daerah Kabupaten dengan utusan 7 orang pengurus
3. Melaksanakan pemberian BDBS (Bantuan Dana Bea Siswa) dilingkungan PT dan PTA untuk anak-anak pegawai dan anak-anak tenaga kontrak yang tidak mampu.
4. Melaksanakan Kunjungan, anjongsana bagi pegawai/keluarga (Suami, Istri, anak ke 1 dan ke 2) yang sakit opname dirumah sakit dengan dana dari dana social DYK dari cabang masing-masing PT dan PTA Bandar Lampung.
 - o Kunjungan /anjongsana apabila ada yang meninggal dunia

- Kunjungan/anjingsana bagi yang melahirkan (anak ke 1 dan ke 2)
- 5. Mengikuti senam jum'at pagi disetiap instansi masing-masing bagi PT dan PTA Bandar Lampung
- 6. Mengikuti/Peringatan Nuzulul Qur'an setiap bulan Rhamadan ditambah buka puasa bersama di instansi masing-masing baik di PT dan PTA Bandar Lampung
- 7. Mengadakan bhakti social ketenmpat panti jompo/panti asuhan pada bulan suci rhamadan dengan member santunan dari dana social DYK Cabang baik dari PT dan PTA bandarlampung baik uang tunai ataupun bahan-bahan sembako.

6. KOPERASI

1. Penataan keuangan koperasi dan pembenahan/Penyesuaian tunggakan anggota
2. Meningkatkan jumlah simpanan sukarela dan simpan pinjam bagi pengurus dan anggotanya.
3. Meningkatkan pinjaman barang bagi pengurus dan anggotanya, untuk barang disesuaikan dengan kebutuhan /Konsumtif. Misalnya :
 - Pelampung
 - Baju DYK
 - Pengadaan baju PTWP- kerja sama dengan koperasi

7. IPASPI

- Belum membuat program.

BAB III
SIMBOL-SIMBOL PENGUATAN
TUGAS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

A. 9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

B. 10 BUDAYA MALU

1. Malu Datang Terlambat Pulang Cepat
2. Malu Melihat Rekan S ibuk Melakukan aktifitas
3. Malu Menuntut Hak Tidak Tahu Kewajiban
4. Malu karena kerja selalu salah
5. Malu kerja tidak sesuai aturan
6. Malu karna kerja tidak berprestasi
7. Malu karena tugas tidak tepat terlaksana tepat waktu
8. Malu berperilaku dan berbicara tidak sopan
9. Malu tidak bertegur sapa sesama teman
10. Malu tidak berperan aktif mewujudkan kebersihan.

**C. BUDAYA KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG**

(3 S)

. SENYUM

. SALAM

. SAPA

. SOPAN

. SANTUN

(5 R)

. RINGKAS

. RAPI

. RESIK

. RAWAT

. RAJIN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. HASIL RUMUSAN BIDANG TEKNIS

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI	HASIL RUMUSAN	KET
EKSEKUSI				
1.	Perkara yang dimohonkan eksekusi, asli sertifikat dipegang oleh termohon eksekusi dan tidak mau menyerahkannya, sementara KPKNL memerlukannya untuk kelengkapan lelang.	Perlu dikoordinasikan secara nasional dengan KPKNL dalam hal ini MA/Dirjen Kekayaan Negara dan Badan Pertanahan Nasional. Hasilnya dijadikan rujukan bersama di seluruh Pengadilan Agama	<p>Dalam hal ini ada dua solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PA mengirimkan surat permohonan Blokir kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan melampirkan putusan PA agar BPN mengeluarkan surat keterangan bahwa sertifikat tersebut yang ada pada termohon telah diblokir dan selanjutnya surat pemblokiran dari BPN tersebut dikirim kepada KPKNL. 2. Untuk kelancaran penyelesaian permohonan eksekusi, perlu dilakukan koordinasi dan MoU dengan BPN/ATR dan KPKNL di masing-masing daerah dan untuk tingkat nasional dilakukan MoU antara MA dalam hal ini Ditjen Badilag MA-RI dengan Badan Pertanahan Nasional dan Dirjen Kekayaan Negara. 	

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI	HASIL RUMUSAN	KET
2.	<p>Jika suatu perkara harta bersama telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Pada saat aanmaning, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Penggugat. Namun pada berjalannya waktu Tergugat tidak jadi menyerahkan obyek tersebut. Apakah Penggugat boleh mengajukan permohonan eksekusi lagi atas obyek tersebut?</p>	<p>Boleh; Pada saat terjadi perdamaian tersebut pesediaan Tergugat melaksanakan putusan secara sukarela dituangkan dalam surat pernyataan dengan menyebutkan waktu dan tempat yang jelas kapan dan di mana objek tersebut akan diserahkan;</p>	<p>Pada prinsipnya, bila eksekusi telah berakhir dengan jalan damai (dilaksanakan sukarela) dan telah dibuat Berita Acara yang memuat secara rinci tentang kesepakatan para pihak tersebut, maka tidak ada lagi eksekusi setelah itu, dan apabila dikemudian hari salah satu pihak tidak mau melaksanakan/ kembali mengambil atau menguasai obyek tersebut, maka sudah masuk ranah pidana.</p> <p>Kecuali apabila para pihak berdamai dan Pemohon mencabut permohonan eksekusi lalu Ketua PA membuat penetapan pencabutan, maka permohonan eksekusi dapat diajukan kembali, apabila pihak-pihak tidak melaksanakan secara suka rela. Apabila pihak-pihak berkeinginan menyelesaikan secara damai, KPA memberi waktu dalam tempo 8 hari sejak aanmaning, jika ternyata tidak terjadi, eksekusi dilanjutkan.</p>	

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI	HASIL RUMUSAN	KET
3.	Jika eksekusi riil sebidang tanah bersertifikat, apakah sertifikat tanah tersebut juga harus diserahkan kepada pemohon Eksekusi	Jika dalam amar putusan tidak terdapat perintah untuk menyerahkan sertifikat maka jurusita tidak boleh mengambil sertifikat yang dikuasai termohon eksekusi	Jurusita yang melaksanakan tugas tidak bisa meminta Termohon eksekusi untuk menyerahkan sertipikat jika tidak ada dalam amar putusan. KPA mengajukan surat kepada BPN/ATR setempat yang disertai dengan BAP eksekusi riil dengan permintaan agar BPN memblokir sertifikat tersebut.	
4.	KPKNL tidak mau melaksanakan lelang, alasannya tanah tersebut tidak bersertifikat.	Eksekusi bisa dilaksanakan dengan eksekusi riil/dengan jalan mediasi/dading, namun jika tidak bisa Pemohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi/dwangsom terhadap termohon eksekusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksekusi bisa dilaksanakan dengan ekskusi riil/ dengan jalan mediasi/ daading. 2. Adakan pendekatan dengan KPKNL. 	

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI	HASIL RUMUSAN	KET
3.	<p>Suatu putusan harta bersama tingkat pertama telah dilakukan upaya hukum banding dan kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena dalam putusan terdapat dictum amar yang menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separuh dari objek rumah harta bersama setelah dikeluarkan nilai harga rumah orang tua Tergugat yang telah dibongkar sebelum adanya bangunan rumah harta bersama, sedangkan rumah yang telah dibongkar tidak dapat diketahui nilai taksirannya. Langkah apa yang harus ditempuh pengadilan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi?</p>	<p>Eksekusi harus dilaksanakan sesuai amar putusan. Jika tidak dapat dilaksanakan diterbitkan penetapan yang menyatakan eksekusi non ekscutable.</p>	<p>Pada prinsipnya yang dieksekusi adalah amar putusan. Oleh karena itu dalam merumuskan amar harus rigit, lengkap, jelas dan tidak multi tafsir.</p>	
4.	<p>Panjar biaya eksekusi telah habis dan eksekusi belum selesai, kemudian Pemohon eksekusi ditegur untuk menambah panjar biaya eksekusi, namun tetap tidak membayar. Bagaimana solusinya?</p>	<p>Apabila Pemohon eksekusi setelah ditegur sebanyak tiga kali ternyata tetap tidak mau menambah panjar biaya eksekusi, pada hal biaya itu diperlukan untuk kelancaran jalannya eksekusi, maka permohonan eksekusi</p>	<p>Pemohon eksekusi ditegur untuk menambah panjar biaya, sekaligus diperingatkan jika dalam tempo yang ditentukan tidak menambah biaya, akan dicoret dari register permohonan eksekusi. Ketua PA membuat penetapan bahwa eksekusi dicoret dari daftar register.</p>	

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI	HASIL RUMUSAN	KET
		dicoret dari daftar perkara permohonan eksekusi. Jika Pemohon eksekusi ingin melanjutkan lagi, maka Pemohon harus mendaftar ulang eksekusi baru mulai dari awal. Sebaiknya pendaftaran eksekusi biayanya dihitung sampai biaya pengosongan sekaligus.		
EKONOMI SYARIAH				
5.	Belum ada aturan tentang ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apa saja yang masuk dalam komponen ganti rugi akibat PMH ?	Perlu ada aturan terkait hal batasan ganti rugi atas perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Ganti rugi (<i>ta'widh</i>) dalam perkara ekonomi syariah, berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ganti rugi ekonomi syariah tidak boleh menerapkan bunga (<i>interst</i>), kemungkinan kerugian yang akan dialami (<i>potencial loss</i>) dan keuntungan yang diharapkan. Untuk itu, pelajari Fatwa DSN -MUI Tentang Wanprestasi Dan Ganti Rugi, Antara Lain: 1. Fatwa DSN No. 129/DSN-	

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI	HASIL RUMUSAN	KET
			<p>MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi</p> <p>2. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)</p> <p>3. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.</p>	
6.	<p>Terjadinya gadai di masyarakat yang dilakukan secara lisan kemudian terjadinya sengketa diantara mereka. Dapatkan perkara mereka diajukan ke Pengadilan Agama? Kalau yang satu mengajukan ke PA sedangkan yang lain ke PN, karena waktu akad secara lisan tidak disebutkan kemana perkara diajukan apabila terjadi sengketa?</p>	<p>Dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan asas personalitas kelslaman. Harus ada lembaga yang melisensi setiap akad apakah itu syariah atau tidak sehingga bisa diajukan ke Pengadilan Agama.</p>	<p>Sepanjang gadai tersebut gadai syariah, maka menjadi kewenangan PA. Jika ada perkara gadai (<i>rahn</i>) yang pihak-pihaknya beragama Islam dan akadnya dilakukan secara lisan, status akadnya (secara syariah atau tidak) tergantung pemeriksaan di persidangan. Jika terbukti akad tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, maka bukan menjadi kewenangan PA.</p>	

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI	HASIL RUMUSAN	KET
7.	<p>Dalam fikih terdapat ketentuan tentang khiyar sebagai batasan kapan suatu akad dapat dibatalkan karena adanya cacat pada akad. Pada saat nasabah tidak mampu membayar, kemudian mengajukan pembatalan akad dengan alasan terdapat cacat pada akad, seperti penipuan harga dasar barang dalam transaksi murabahah, apakah masih boleh dipertimbangkan alasan tersebut? Apakah tidak sebaiknya digunakan konsep khiyar dalam fikih untuk akas syariah?</p>	<p>Sebaiknya dalam akad syariah dibuat batasan waktu kapan boleh akad dibatalkan dengan alasan cacat pada salah satu syarat atau rukun akad.</p>	<p>Pedomani Rumusan Kamar Agama tahun 2019 tentang Ekonomi Syariah huruf (b) (vide Sema No 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ; <i>"Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam, hanya dapat dilakukan sebelum obyek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/ nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan"</i></p>	

LAMPIRAN II - RINCIAN PROGRAM KERJA BIDANG KEPANITERAAN

NO	PROGRAM KERJA	KEBIJAKAN	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	BIAYA (Sumber Dana)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Penanganan Penyelesaian Perkara Banding 100%	Efektifitas Waktu dan Profes Penanganan Perkara	Penanganan Perkara 100%	Proses pelaksanaan penanganan perkara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Panitera	Hakim	Biaya Proses (150.000xJumlah Perkara)
2	Pembaharuan SK Bagian Kepaniteraan	Pembaharuan SK dilakukan Setiap Awal tahun dan direvisi apabila ada pegawai yg promosi, mutasi atau pensiun	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Baik	Membuat SK dilakukan Awal tahun dan direvisi apabila ada pegawai yg promosi, mutasi atau pensiun	√												Kepegawaian	Kepegawaian	
3	Pembuatan Papan Keadaan Perkara, Grafik Perkara Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandarlampung	Membuat Papan Keadaan Perkara, Grafik Perkara Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandarlampung setiap Awal Tahun	Data perkara dapat di Update secara Aktual	Membuat Papan Keadaan Perkara, Grafik Perkara	√												Panmud Hukum	Staf Panmud Hukum	DIPA 2021
4	Penyajian Informasi Perkara yang diajukan Kasasi dan PK	Membuat Laporan Perkara yang diajukan Kasasi dan PK	Terdapat Informasi Perkara yang diajukan Kasasi dan PK	Membuat Laporan Perkara yang diajukan Kasasi dan PK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Panmud Hukum	Staf Panmud Hukum	DIPA 2021

LAMPIRAN III – RINCIAN PROGRAM KERJA BIDANG KESEKRETARIATAN

1. KEUANGAN DAN PELAPORAN

No.	PROGRAM	KEBIJAKAN	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL WAKTU												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	DAN A (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Peningkatan kualitas Administrasi Keuangan.	Terwujudnya administrasi keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Tertib administrasi keuangan yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Uang Persediaan (UP) di Awal tahun serta Mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Minimal Satu Kali Sebulan. 2. Melengkapi dan Mengarsipkan Buku Kas Umum Berikut Dengan semua Buku Bantu tentang keuangan 3. Mengarsipkan segala bukti pengeluaran di bidang keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Mengisi dan Melengkapi Aplikasi di bidang Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi SAIBA b. Aplikasi Simak-BMN c. Aplikasi GPP d. Aplikasi SAS e. Aplikasi Komdanas f. Aplikasi Sakti 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KPA/PPK	Bendahara	DIPA
			Terlaksananya ketepatan waktu pemenuhan hak pegawai dalam bidang keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembayaran hak pegawai tepat waktu. <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji masuk rekening pegawai pada hari pertama di setiap awal bulan. b. Pengajuan kekurangan gaji sesegera mungkin. c. Pengajuan uang makan paling lambat 3 hari kerja setiap bulannya. 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	Bendahara	
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	Operator SAIBA Operator SIMAK PPABP		
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	Bendahara Staff Keuangan		
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	PPABP		
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	PPABP		
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	PPABP		

No.	PROGRAM	KEBIJAKAN	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL WAKTU												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	DAN A (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6												7	8	9
				Media															
				7. Membuat Papan Laporan Realisasi Anggaran dan diTempatkan di tempat yang bisa dilihat oleh semua pegawai.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	Operator SIMAK
				8. Menginventarisasi Keberadaan Barang Inventaris dan Mengajukan Penghapusan Barang Inventaris Yang Sudah Tidak Bisa digunakan Lagi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	Operator SAIBA
			Terlaksananya laporan keuangan Tingkat Koordinator Wilayah Lampung yang akuntabel	1. Memonitoring Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan Satker di Wilayah Lampung Setiap Bulan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	Operator SIMAK
				2. Meneruskan Surat-Surat Dari Satker Kepada Instansi Yang Berwenang Dalam Hal:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasub Keu & Pel	Operator SIMAK
				- Permohonan Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasubkeu & pel	Operator SIMAK
				- Permohonan Sewa BMN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasubkeu & pel	Operator SIMAK
				- Permohonan Penghapusan BMN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kasubkeu & pel	Operator SIMAK
				- Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)								X						Kasubkeu & pel	Operator SIMAK
				3. Membuat Laporan Keuangan Tingkat Satker / Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPAW)	X							X						Kasubkeu & pel.	Operator SAIBA
				4. Membuat Laporan Keuangan BMN Tingkat wilayah/Unit Kuasa Pengguna Barang Wilayah (UAKPBW)	X							X						Kasubkeu & pel	Operator SAIBA

NO	PROGRAM	KEBIJAKAN	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL WAKTU												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	DANA (Rp)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6												7	8	9	
				24. Penghitungan Training Need Analysis PA Sewilayah Lampung													x	Kasubag Kp dan TI.	Kasubag Kp dan TI.	

4. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

No.	PROGRAM	KEBIJAKAN	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL WAKTU												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	DANA (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Administrasi Tata Persuratan	Terwujudnya administrasi Tata persuratan yang tertib dan teratur	Terlaksananya Tertib administrasi Tata persuratan secara elektronik dengan tata kelola secara elektronik	1. Penerimaan persuratan secara tertib dan teratur 2. Pencatatan persuratan secara tertib 3. Penginputan persuratan secara tertib dan teratur kedalam aplikasi persuratan elektronik 4. Pendistribusian Persuratan dengan tertib 5. Pengarsipan atau tata kelola persuratan dengan tertib dan teratur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pelaksana	
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pelaksana	
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pelaksana	
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pelaksana	

No.	PROGRAM	KEBIJAKAN	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL WAKTU												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	DANA (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6												7	8	9
2.	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Layanan Perpustakaan	Terwujudnya layanan perpustakaan yang dinamis dan berkualitas	Terlaksananya layanan perpustakaan yang dinamis dan berkualitas secara elektronik	1. Peningkatan SDM Pustakawan yang berkualitas dan profesional 2. Menyediakan koleksi buku bacaan yang variatif 3. Mendisain ruang perpustakaan dengan menarik 4. Peningkatan layanan perpustakaan baik terbuka atau tertutup 5. Membuat Laporan Layanan Perpustakaan dalam potensi membaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pustakawan Operator Tenaga Administrasi	
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pustakawan	
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pustakawan Tenaga administrasi	
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pustakawan Operator	
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kasubbag TU dan RT	Pustakawan	

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMRY B 1039 UAH

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.750.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.750.000	Rp.1.650.000	Rp. 20.000.000	
2	GANTI OLI														
3	BAN														
4	FILTER OLI														
5	SERVICE														
6	PAJAK														
7	PERAWATAN LAINNYA														
8															
JUMLAH													Rp. 20.000.000		

FORTUNER B 1395 UJR

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.750.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.650.000	Rp.1.750.000	Rp.1.650.000	Rp. 20.000.000	
2	GANTI OLI														
3	BAN														
4	FILTER OLI														
5	SERVICE														
6	PAJAK														
7	PERAWATAN LAINNYA														
8															
JUMLAH													Rp. 20.000.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

ALTIS BE 1173 PS

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.400.000	Rp.1.400.000	Rp.1.300.000	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp.1.650.000	Rp.1.300.000	Rp.1.400.000	Rp.1.400.000	Rp.1.350.000	Rp.1.500.000	Rp.1.350.000	Rp.16.800.000	
2	GANTI OLI			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000	Rp.2.000.000	
3	BAN					Rp.3.900.000								Rp.3.900.000	
4	FILTER OLI			Rp.200.000			Rp.200.000						Rp.200.000	Rp.600.000	
5	SERVICE	Rp.400.000				Rp.400.000						Rp.400.000		Rp.1.200.000	
6	PAJAK								Rp.1.400.000		Rp.1.000.000			Rp.2.400.000	
7	PERAWATAN LAINNYA														
8															
JUMLAH													Rp. 26.900.000		

ALTIS BE 1314 AZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp.1.350.000	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp.1.650.000	Rp.1.400.000	Rp.1.350.000	Rp.1.300.000	Rp.1.400.000	Rp.1.550.000	Rp.1.400.000	Rp. 16.900.000	
2	GANTI OLI		Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000		Rp. 2.000.000	
3	BAN	Rp.4.200.000												Rp. 4.200.000	
4	FILTER OLI		Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000		Rp. 800.000	
5	SERVICE			Rp.350.000			Rp.350.000				Rp.350.000			Rp.1.050.000	
6	PAJAK								Rp.1.200.000					Rp.1.200.000	
7	PERAWATAN LAINNYA				Rp.300.000					Rp.350.000				Rp.650.000	
8															
JUMLAH													Rp. 26.800.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

INNOVA BE 1523 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.200.000	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp.1.300.000	Rp.1.400.000	Rp. 1.750.000	Rp.1.550.000	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp.1.350.000	Rp. 1.650.000	Rp.1.300.000	Rp.17.000.000	
2	GANTI OLI	Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.2.000.000	
3	BAN									Rp.3.800.000				Rp.3.800.000	
4	FILTER OLI				Rp.200.000						Rp.200.000			Rp.400.000	
5	SERVICE			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000	Rp.1.400.000	
6	PAJAK						Rp. 1.700.000							Rp. 1.700.000	
7	PERAWATAN LAINNYA		Rp300.000						Rp300.000					Rp. 600.000	
8															
JUMLAH													Rp. 26.900.000		

VIOS BE 1021 AZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.200.000	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp. 1.650.000	Rp.1.500.000	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp.1.300.000	Rp. 1.550.000	Rp.1.350.000	Rp.16.650.000	
2	GANTI OLI			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000	Rp.2.000.000	
3	BAN										Rp.4.000.000			Rp.4.000.000	
4	FILTER OLI			Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000	Rp.800.000	
5	SERVICE		Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000		Rp.1.400.000	
6	PAJAK	Rp. 1.100.000												Rp. 1.100.000	
7	PERAWATAN LAINNYA		Rp.300.000					Rp.300.000			Rp.300.000			Rp.900.000	
8															
JUMLAH													Rp. 26.850.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

GRAND LIVINA

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.400.000	Rp.1.250.000	Rp.1.300.000	Rp.1.350.000	Rp.1.400.000	Rp. 1.700.000	Rp.1.400.000	Rp.1.300.000	Rp.1.400.000	Rp.1.350.000	Rp. 1.650.000	Rp.1.400.000	Rp.16.900.000	
2	GANTI OLI	Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.2.000.000	
3	BAN									Rp.3.500.000				Rp.3.500.000	
4	FILTER OLI	Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.800.000	
5	SERVICE			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000	Rp.1.400.000	
6	PAJAK												Rp.1.100.000	Rp.1.100.000	
7	PERAWATAN LAINNYA		Rp.300.000				Rp.300.000		Rp.300.000				Rp.300.000	Rp.1.200.000	
8															
JUMLAH													Rp. 26.900.000		

TERRANO BE 2690 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.350.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.1.400.000	Rp.1.300.000	Rp. 1.750.000	Rp.1.400.000	Rp.1.350.000	Rp.1.550.000	Rp.1.300.000	Rp. 1.550.000	Rp.1.350.000	Rp.16.900.000	
2	GANTI OLI		Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000		Rp.2.000.000	
3	BAN				Rp.3.900.000									Rp.3.900.000	
4	FILTER OLI		Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000			Rp.200.000		Rp.800.000	
5	SERVICE	Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.1.400.000	
6	PAJAK	Rp. 1.000.000												Rp. 1.000.000	
7	PERAWATAN LAINNYA			Rp.300.000			Rp.300.000			Rp.300.000				Rp.900.000	
8															
JUMLAH													Rp. 26.900.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

AVANZA BE 2435 AY

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp.1.000.000	Rp.1.150.000	Rp.1.100.000	Rp.1.050.000	Rp.1.100.000	Rp. 1.250.000	Rp.1.050.000	Rp.1.150.000	Rp.1.100.000	Rp.1.150.000	Rp. 1.250.000	Rp.1.150.000	Rp.13.500.000	
2	GANTI OLI	Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.500.000			Rp.2.000.000	
3	BAN									Rp.3.300.000				Rp.3.300.000	
4	FILTER OLI				Rp.200.000						Rp.200.000			Rp.400.000	
5	SERVICE			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000			Rp.350.000	Rp.1.400.000	
6	PAJAK											Rp. 700.000		Rp. 700.000	
7	PERAWATAN LAINNYA		Rp300.000	Rp.5.000.000					Rp300.000					Rp. 5.600.000	1. Pengecatan 2. Ganti Bumper depan 3. Ganti Shock Belakang 4. Perbaiki power window dan kaca film
JUMLAH													Rp. 26.900.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

BE 6671 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000	Rp. 200.000	
3	BAN					Rp. 250.000								Rp. 250.000	
4	FILTER OLI														
5	SERVICE								Rp. 100.000					Rp. 100.000	
6	PAJAK				Rp. 250.000									Rp. 250.000	
7	PERAWATAN LAINNYA														
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

BE 6672 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI		RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000		Rp. 200.000	
3	BAN									Rp. 250.000				Rp. 250.000	
4	FILTER OLI														
5	SERVICE						Rp. 100.000							Rp. 100.000	
6	PAJAK					Rp. 250.000								Rp. 250.000	
7	PERAWATAN LAINNYA														
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

BE 6673 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI	RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			Rp. 200.000	
3	BAN											Rp. 250.000		Rp. 250.000	
4	FILTER OLI														
5	SERVICE					Rp. 100.000								Rp. 100.000	
6	PAJAK				Rp. 250.000									Rp. 250.000	
7	PERAWATAN LAINNYA														
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

BE 6674 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI		RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000		Rp. 200.000	
3	BAN										Rp. 250.000			Rp. 250.000	
4	FILTER OLI														
5	SERVICE			Rp. 100.000										Rp. 100.000	
6	PAJAK				Rp. 250.000									Rp. 250.000	
7	PERAWATAN LAINNYA														
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

BE 6675 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI	RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			Rp. 200.000	
3	BAN						Rp. 250.000							Rp. 250.000	
4	FILTER OLI														
5	SERVICE								Rp. 100.000						
6	PAJAK				Rp. 250.000									Rp. 100.000	
7	PERAWATAN LAINNYA													Rp. 250.000	
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

BE 6676 BZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI		RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000		Rp. 200.000	
3	BAN									Rp. 250.000				Rp. 250.000	
4	FILTER OLI														
5	SERVICE														
6	PAJAK				Rp. 250.000						Rp. 100.000			Rp. 100.000	
7	PERAWATAN LAINNYA													Rp. 250.000	
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

**RENCANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

BE 6679 CZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI	RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP. 100.000	Rp. 200.000
3	BAN		Rp. 250.000												Rp. 250.000
4	FILTER OLI														
5	SERVICE														
6	PAJAK				Rp. 250.000				Rp. 100.000						Rp. 100.000
7	PERAWATAN LAINNYA														Rp. 250.000
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

BE 3304 CZ

NO	Jenis Pemeliharaan	KEBUTUHAN KENDARAAN												Perkiraan Biaya	Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	BBM	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	
2	GANTI OLI			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000			RP.50.000	RP. 200.000	
3	BAN													Rp. 250.000	
4	FILTER OLI														
5	SERVICE														
6	PAJAK				Rp. 250.000			Rp. 100.000							Rp. 100.000
7	PERAWATAN LAINNYA														Rp. 250.000
8															
JUMLAH													Rp. 2.000.000		

**RENCANA PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	Ruangan	KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR											
		ATK Januari	ATK Februari	ATK Maret	ATK April	ATK Mei	ATK Juni	ATK Juli	ATK Agustus	ATK September	ATK Oktober	ATK November	ATK Desember
1	Hakim 1	Rp 650,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
2	Hakim 2	Rp 650,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
3	Hakim 3	Rp 650,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
4	Hakim 4	Rp 650,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
5	Hakim 5	Rp 650,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
6	Kepegawalan	Rp 900,000	Rp 700,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
7	Keuangan	Rp 850,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
8	Panitera pengganti	Rp 700,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
9	Panmud Banding	Rp 650,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
10	Panmud Hukum	Rp 650,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000	Rp 610,000
	Jumlah	Rp 7,000,000	Rp 6,190,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000	Rp 6,100,000
		Jumlah Total											

**RENCANA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	KEBUTUHAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Rp 37,557,500			Rp 37,557,500			Rp 37,557,500				Rp 37,557,500	
Jumlah Total												
Rp												

**RENCANA PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	KEBUTUHAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500	Rp 2,637,500
Jumlah Total												
Rp												

**RENCANA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	KEBUTUHAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000					Rp 10,315,000				Rp 10,315,000	
Jumlah Total												Rp

**RENCANA PEMELIHARAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN LAINNYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	KEBUTUHAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500	Rp 667,500
Jumlah Total												Rp

**RENCANA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	Nama Barang	KEBUTUHAN												Perkiraan			
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
1	Komputer			Rp 912,500			Rp 912,500			Rp 912,500							
2	Laptop			Rp 2,625,000			Rp 2,625,000			Rp 2,625,000					Rp 912,500		Rp 3,537,500
3	Printer			Rp 2,070,000			Rp 2,070,000			Rp 2,070,000							Rp 10,680,000
4	AC Split			Rp 3,150,000			Rp 3,150,000			Rp 3,150,000							Rp 12,600,000
5	Pemeliharaan Genset						Rp 1,901,000										Rp 3,802,000
6	Bahan Bakar Genset			Rp 625,000			Rp 625,000							Rp 625,000			Rp 3,125,000
	Jumlah			Rp 9,382,500			Rp 11,283,500			Rp 9,382,500				Rp 625,000			Rp 25,200,000
	Jumlah Total									Rp 9,382,500				Rp 11,283,500			Rp 41,800,000

**RENCANA OPERASIONAL PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAN JABATAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	Nama Kegiatan	KEBUTUHAN												Perkiraan			
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
1	Kudapan			Rp 1,400,000			Rp 1,400,000			Rp 1,400,000							
2	Makan			Rp 2,800,000			Rp 2,800,000			Rp 2,800,000					Rp 1,400,000		Rp 5,600,000
	Jumlah			Rp 4,200,000			Rp 4,200,000			Rp 4,200,000					Rp 2,800,000		Rp 11,200,000
	Jumlah Total									Rp 4,200,000					Rp 4,200,000		Rp 16,800,000

**RENCANA OPERASIONAL RAPAT KOORDINASI INTERNAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	Nama Kegiatan	KEBUTUHAN												Perkiraan			
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
1	Kudapan		Rp 1,400,000		Rp 1,400,000		Rp 1,400,000		Rp 1,400,000		Rp 1,400,000						
2	Makan		Rp 2,800,000		Rp 2,800,000		Rp 2,800,000		Rp 2,800,000		Rp 2,800,000				Rp 1,400,000		Rp 8,400,000
	Jumlah		Rp 4,200,000		Rp 4,200,000		Rp 4,200,000		Rp 4,200,000		Rp 4,200,000				Rp 2,800,000		Rp 16,800,000
	Jumlah Total				Rp 4,200,000				Rp 4,200,000		Rp 4,200,000				Rp 4,200,000		Rp 25,200,000

D 1.PROGRAM APM DAN ZI

NO	PROGRAM	KEBIJAKAN	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL WAKTU												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	DANA (Rp)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Mendukung program prioritas yang ditetapkan Dirjen Badilag	1. Menerapkan seluruh program prioritas di PTA bandarlampung.	1. APM	Melakukan Sidag Monitoring Implementasi APM					x								x	Pimpinan	Seluruh Pimpinan, Hakim dan Pegawai PTA dan PA sewilayah.	
2.		2. Menerapkan seluruh program prioritas di PA sewilayah PTA Bandarlampung.		Melakukan Pendampingan Persiapan Surveyance			x										x	Pimpinan	Seluruh Pimpinan, Hakim dan Pegawai PTA dan PA sewilayah.	
3.		3.	2. Zi	Melakukan Pembinaan terhadap Pembangunan Zona Integritas PA sewilayah PTA Bandarlampung	x													Pimpinan	Seluruh Pimpinan, Hakim dan Pegawai PTA dan PA sewilayah.	
4		4.	3.	Menetapkan Pengadilan Agama yang akan diusulkan untuk memperoleh WBK ke MA		x												Pimpinan	Seluruh Pimpinan, Hakim dan Pegawai PTA dan PA sewilayah.	
		5.	4.	Melakukan pendampingan persiapan			x											Pimpinan	Seluruh Pimpinan, Hakim dan	

				evidence video presentasi dll untuk pengadilan Agama yang telah ditetapkan untuk diusulkan																Pegawai PTA dan PA sewilayah.		
		6.	5.	Mengusulkan satker yang diusulkan mendapat predikat WBK ke MA			x													Pimpinan	Seluruh Pimpinan, Hakim dan Pegawai PTA dan PA sewilayah.	